



# PENDIDIKAN KEAGAMAAN SOSIALIS-HUMANIS SEBAGAI BASIS MODERASI BERAGAMA

Oleh:

**Herrio Tekdi Nainggolan, Trinovianto G.R. Hallatu,  
Ni Nyoman Rediani, Bernadetha Rizki Kaize**

Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Musamus

E-mail : rionainggolan@unmus.ac.id, ophan\_ambon@yahoo.co.id,  
nyoman.rediani@unmus.ac.id, kaizedetha@unmus.ac.id

Proses Review 26 Oktober-10 Desember, dinyatakan lolos 12 Desember

## **Abstract**

*Education as an instrument of human civilization has a very central role and function in shaping patterns of human behavior both individually and in groups when interacting in society. This paper explores how socialist-humanist religious education becomes the basis of religious moderation for society in the midst of religious diversity and complexity. By using a qualitative research method and a literature review approach to study the subject matter, the answers to the problems in this paper are presented in a descriptive narrative form. The results of the study show that socialist-humanist religious education is able to awaken the religious community to interpret and understand not only the religion they adhere to but also other religions in relation to social and human relations. Socialist-humanist religious education makes it possible to interpret and understand religion broadly and deeply so that it does not belittle the substance of religion only in the realm of divinity. With such a meaning and understanding of religion, the essence of religious people, namely being tolerant and moderately religious, can be realized. Religion is not only understood in the theological-dogmatic realm, but religious messages are also understood in a socialist-humanist sense.*

**Keywords:** *Religious Education, Socialist, Humanist, Religious Moderation.*

## **Abstrak**

Pendidikan sebagai instrumen peradaban manusia memiliki peran dan fungsi yang amat sentral untuk membentuk pola perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan keagamaan sosialis-humanis menjadi basis moderasi beragama bagi masyarakat di tengah keragaman dan kompleksitas keagamaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan kajian pustaka dalam mengkaji pokok permasalahan, jawaban dalam tulisan ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan sosialis-humanis mampu meniadakan masyarakat agama, untuk memaknai dan memahami bukan saja agama yang dianut teta-

pi juga agama lain dalam hubungannya dalam relasi sosial dan kemanusiaan. Pendidikan keagamaan sosialis-humanis memungkinkan untuk memaknai dan memahami agama secara luas dan mendalam sehingga tidak mengkerdikan substansi agama hanya dalam ranah ketuhanan. Dengan pemaknaan dan pemahaman agama yang demikian, maka esensi dari manusia beragama yaitu dimengerti adalah bersikap toleran dan beragama secara moderat. Agama tidak semata dipahami dalam ranah teologis-dogmatis, tetapi pesan agama juga dimaknai dalam pengertian sosialis-humanis.

**Kata kunci:** Pendidikan Keagamaan, Sosialis, Humanis, Moderasi Beragama.

## I. PENDAHULUAN

Program moderasi beragama yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan bentuk keseriusan negara dalam hal pengelolaan keberagaman, khususnya keragaman agama (Irama, 2021). Berkaca pada relasi agama di masyarakat yang sering memunculkan konflik atas nama agama, maka pendidikan agama dan keagamaan yang moderat tentu menjadi sangat penting dan sentral untuk dipikirkan (Sutrisno, 2019). Dalam hal ini, upaya untuk mewujudkan persatuan dan toleransi antaragama bukan saja sebagai tugas dan tanggung jawab kementerian agama, lembaga agama, tetapi oleh semua pihak khususnya lembaga pendidikan (Akhmadi, 2019).

Dalam mengimplementasikan perwujudan moderasi beragama khususnya di lingkungan perguruan tinggi, menurut Anis Masykhur ada berbagai cara dan bentuk yang dapat dilakukan. Cara itu di antaranya, pada materi perkuliahan disengaja disisipkan muatan ajar untuk mendukung moderasi beragama. Selain itu, pendekatan pembelajaran diarahkan pada berpikir kritis, analitis, toleran dan bersikap terbuka, dan juga dapat melakukan pelatihan moderasi beragama (Aceng et al., 2019).

Hal lain juga dapat mengacu pada peran dan kedudukan budaya lokal yaitu sebagai pembentuk jati diri dan identitas bangsa yang sangat kuat untuk memfilter pengaruh dari budaya luar yang cenderung menghilangkan persatuan dan keutuhan bangsa (Daniah, 2016). Rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah air dapat dipupuk dan dikembangkan dengan penguatan terhadap narasi-narasi kedaerahan dan tempat

kelahiran, penghargaan terhadap budaya lokal, hal ini sangat kuat untuk menangkal radikalisme agama (Kholidah, 2019). Begitu juga dengan ritual dan kebudayaan masyarakat (Ode, 2015) yang berakar pada tradisi masyarakat, adat istiadat kolektif serta kearifan lokal daerah (Putra, 2017) perlu dilestarikan pemerintah guna menjaga harmoni serta relasi sosial. Tradisi dan budaya dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar karena dianggap sebagai yang sakral (Bustanuddin, 2007). Peran ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang sangat penting dan menentukan demi terciptanya moderasi beragama (Naj'ma & Bakri, 2021). Menurut penulis, dari perspektif sosiologis, perwujudan moderasi beragama dapat terimplementasikan dengan pendidikan keagamaan yang sosialis-humanis. Ajaran sosialis humanis yang dimaksud adalah berbasis pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya lokal, budaya nusantara dan yang kesemuanya adalah kandungan paling dasar dari substansi beragama.

Tujuan tulisan ini untuk memberikan pokok-pokok pikiran bagaimana pendidikan keagamaan sosialis-humanis berperan untuk menjelaskan pentingnya memiliki pemahaman terhadap agama dan keagamaan secara moderat, menekankan nilai-nilai sosial kemanusiaan, sehingga masyarakat agama memiliki pemahaman yang kritis, terbuka dan komprehensif terhadap ajaran-ajaran yang dianut. Dengan demikian, masyarakat religius tidak lagi diasosiasikan sebagai masyarakat yang eksklusif dalam berelasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan orang yang berbeda agama. Hal ini menjadi penting, karena dalam sejarah perjalanan negara ini, kekerasan dan konflik sosial atas

nama agama adalah fakta sosial dan realitas yang mesti dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk membangun dan mengisi kemerdekaan bangsa ini (Imam, 2018). Kekerasan dan konflik atas nama agama ibarat musuh yang sedang dan terus mengintai sehingga harus dicegah dan diantisipasi secara serius oleh semua pihak, termasuk insan pendidikan.

## II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Menggunakan kajian pustaka dimaksudkan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penguatan pentingnya agama dipahami secara lebih moderat dan terbuka dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil penelitian dan mengembangkan pemahaman atau pandangan (teori).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu, baik dari buku, jurnal, dokumen atau arsip yang memuat data dan informasi seputar topik penelitian. Kemudian, setelah data dikumpulkan, lalu dianalisis dan membuat suatu pandangan yang komprehensif untuk menarik kesimpulan yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai Amanat Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5) dan pasal 37 ayat (3), tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara lebih spesifik amanat tersebut diturunkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.<sup>1</sup> Dalam Peraturan Pemerintah ini, termaktub tujuan dari Pendidikan Agama dan Keagamaan yaitu untuk memberikan pengetahuan serta membentuk kepribadian religius, sikap toleran, berperilaku

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

baik peserta didik dalam memaknai dan menjalankan ajaran agama masing-masing umat beragama (Astawa, 2021). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan agama dan keagamaan bertugas dan memiliki tanggung jawab mengedukasi umat beragama untuk memahami dan memaknai agama serta ajarannya yang menekankan pada nilai-nilai, bukan saja nilai ketuhanan tetapi juga kemanusiaan.

Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 menyatakan tentang "Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari pendidikan nasional dalam perwujudan fungsi serta tujuan pendidikan nasional. Menurut Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan dengan demikian, pendidikan agama dan keagamaan dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mampu mengupayakan kedamaian dan kerukunan antarumat beragama (Astawa, 2021). Bertolak pada kesadaran betapa pentingnya pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pendidikan agama dan keagamaan memainkan peran yang cukup sentral untuk menjaga serta mewujudkan harmoni sosial dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

### **Multi Tafsir Agama**

Salah satu akar permasalahan agama yang paling mendasar adalah perbedaan pandangan mengenai suatu ajaran agama. Doktrin-doktrin agama yang memang ditafsir secara beragam karena memang muatan ajarannya kompleks sehingga dipahami dengan multitafsir. Hal inilah memicu munculnya klaim kebenaran oleh masing-masing aliran agama (Rumagit, 2013). Klaim kebenaran bukan saja terjadi pada agama yang berbeda, tetapi juga dalam agama yang sama, yang kemudian membuat satu agama terbagi menjadi beberapa aliran/mazhab dan terjadi hampir pada semua agama. Bukan hanya perbe-

daan mazhab/aliran yang berbeda, bahkan terdapat kelompok fundamentalis dari hampir semua agama (Amallia, 2019).

Tidak dapat dihindarkan, dalam semua agama terdapat sikap fundamentalis pada pemeluk-pemeluknya. Hal lain harus diakui bahwa dalam kehidupan pemeluk agama-agama yang beragam juga terdapat dilema yang serius yaitu ketika anggota kelompok agama yang satu berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Dalam komunitas agama, hampir semua agama memandang agama yang lain menjadi lawan, terpisah dengan komunitasnya, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya (Akhmadi, 2019).

Bagi pemahaman keagamaan yang moderat, kenyataan ini harus disikapi dan dimaknai sebagai adanya suatu kebenaran yang universal, kebenaran yang jamak, sehingga memunculkan kesadaran dan pemahaman terhadap ajaran agama dan relasi keagamaan menjadi moderat. Agama bersifat plural, tetapi kesemuanya itu menuju pada satu kebenaran yaitu kebenaran Tuhan. Oleh karena itu klaim kebenaran atau kebenaran teologis yang dogmatis perlu dipahami sebagai perbedaan sudut pandang dan bukan malah sebagai justifikasi untuk menyalahkan apalagi menyesatkan yang lain (Natalia, 2016). Dalam pada itu, terminologi sesat merupakan kekerasan teologis yang tidak dapat dibenarkan. Poinnya adalah perbedaan hanyalah soal sudut pandang, perbedaan adalah kejamakan, pluralitas dan kompleksitas dari kebenaran.

Pemahaman dan kesadaran yang demikian tidak dimaksudkan untuk mengaburkan atau menggeser kebenaran doktrinal, sebab jika memang demikian akan sangat berbahaya pada makna dan kebenaran yang substansial dari agama. Agama-agama mengandung kebenaran tersendiri yang tidak mungkin diubah atau diganti oleh perspektif luar karena pemaknaan dan tuntutan pluralisme. Masing-masing penganut agama baik dan bijak bila meyakini bahwa keyakinannya yang paling mutlak benar bagi dirinya, tanpa menyalahkan dan mengusik kebenaran keyakinan yang lain. Inilah paham moderat terhadap agama tanpa mengurangi rasa cinta dan bangga pada ajaran agama, bahkan ajaran agama yang paling eksklusif sekalipun.

Bukankah dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap kemahatakerbatasan dan kemahaluasaan Tuhan dalam agama yang demikian merupakan bentuk ketaatan dan ketundukan diri pemeluk agama? Semua agama mengandung ajaran eksklusifitas, sehingga memang ada kecenderungan semakin religius, semakin eksklusif. Tetapi hal yang demikian terjadi karena memaknai kebenaran yang terlalu sempit, dalam artian mengkerdikan dan menyederhanakan kebenaran yang tak terbatas.

Tidak ada yang salah dengan agama dalam ajaran-ajarannya, tetapi kebenaran itu berlaku pada orang yang meyakini. Ajaran agama yang eksklusif melahirkan fanatisme agama, dan tidak ada yang salah bila masyarakat agama memiliki sikap demikian, sepanjang mereka menempatkan dalam ruang privat dan tidak memberlakukannya pada orang lain. Menurut penulis, masyarakat yang moderat dalam beragama memang tidak salah bila memiliki fanatisme agama dan sikap eksklusifisme, asalkan menempatkannya dalam ranah keyakinan pribadi.

### **Agama sebagai Entitas Privat**

Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center lewat surveinya, *"The Global God Divide"* (2020) menemukan bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat yang paling beragama di dunia (Permata, 2021). Bagi masyarakat Indonesia bahkan agama merupakan hal yang paling penting dalam hidup. Masyarakat Indonesia menganggap agama bukan saja berkaitan dan mengurus urusan personal tetapi juga agama diseret-seret ke ranah publik. Logika yang demikian ini mengungkap fakta bahwa masyarakat Indonesia menginginkan agama untuk mengurus ranah publik. Hal ini bisa kita saksikan dan alami ketika dalam kegiatan dan urusan publik maupun kenegaraan, agama selalu tampil sebagai domain yang amat penting. Dalam upacara, rapat-rapat atau kegiatan kemasyarakatan selalu disertai dengan doa, kutipan-kutipan keagamaan dan simbol-simbol keagamaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, privatisasi agama sepertinya akan menyebabkan kendala dan masalah, karena karakter manusia Indonesia memang pada



dasarnya adalah justru menampilkan eksistensi agama di ruang publik. Bahkan, eksistensi agama bukan saja sebagai pegangan, aturan, norma dan keyakinan pribadi, tetapi masyarakat Indonesia menginginkan agama menjadikan sumber hukum aturan publik. Ketika agama digunakan menjadi acuan hukum dan nilai publik, memang akan menjadi baik dan relevan bila masyarakat tersebut adalah masyarakat yang homogen dan meyakini agama dengan perspektif yang sama. Namun, akan menemui masalah jika masyarakat adalah masyarakat plural dan multikultural. Indonesia yang masyarakatnya plural dan terdiri dari berbagai kultur, etnis dan agama, memiliki sumber nilai yang tidak tunggal, maka perlu disadari bahwa agama bukanlah satu-satunya sumber nilai dalam masyarakat yang demikian itu (Kurniawan, 2017). Dalam hal inilah pentingnya pendidikan dan pemahaman moderasi agama dan keagamaan. Masyarakat agama diedukasi, diberi pemahaman tentang kesadaran pluralis dan pengetahuan multikulturalisme sehingga paham keagamaan tidak dibenturkan dengan realitas sosial yang jamak.

Dalam masyarakat sekuler, di mana aturan dan sistem norma dan aturan yang digunakan oleh negara tidak berasal dari agama, sehingga agama sulit ditampilkan dalam ranah publik. Agama dianggap sebagai urusan pribadi yang hanya bisa dibicarakan pada tingkat individu. Agama dipandang sebagai sesuatu atau hal yang tersembunyi dan sulit dijadikan sebagai wacana dan diskursus publik (Lukito, 2008). Oleh karena itu, agama dan keyakinan ini hanya dapat mengurus pribadi dan semestinya didiskusikan dalam ruang privat. Pemaksaan terhadap kebenaran agama sendiri merupakan tendensi yang malah akan memicu konflik dan merusak harmoni sosial. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya fenomena kekerasan berbasis agama seperti kebencian terhadap pemeluk agama lain, penolakan bertetangga dengan yang berbeda agama, penolakan pembangunan tempat ibadah, narasi penistaan agama, dan munculnya kelompok-kelompok radikal agama (Join et al., 2021).

Hal ini mendasari pemahaman bahwa idealnya sistem di negara kita tidak mesti mengadopsi sistem negara sekuler, tetapi menerapkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam

setiap agama yang diakui karena masyarakat Indonesia adalah negara beragama. Masyarakat Indonesia memiliki karakter kemasyarakatan dan kebangsaan yang melekat dan menjadi jati diri bangsa yang seharusnya menjadi unsur kekuatan dan kebanggaan bersama. Moderasi beragama dalam hal ini berarti "*memodernkan*" agama dengan cara mengubah cara pandang masyarakat agama dalam menyikapi perbedaan yang ada.

### **Pengajaran Agama Humanis-Sosialis**

Menurut nilai-nilai humanisme yang diajarkan dalam agama, seseorang diharapkan dapat tumbuh menjadi orang yang peduli, adil, empatik, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Peran dan tanggung jawab semua agama adalah sama yaitu untuk menghadapi dan menuntaskan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan yang terjadi di mana pemeluk agama itu berada. Sebab, secara sosiologis, permasalahan sosial adalah dosa dan kejahatan yang menjadi musuh semua agama. Semua agama mengajarkan dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan relasi dengan manusia adalah sebagai yang paling penting. Agama mendorong pemeluknya untuk mengimplementasikan nilai-nilai humanis, yaitu seperti welas asih, keadilan, kebajikan, pengampunan, penghormatan, pertolongan, perdamaian, empati, tolong menolong dan lainnya (Nashir, 1999). Inilah ajaran yang paling mendasar dari semua agama yang ada. Semua pemeluknya baik secara individu maupun kolektif diberi amanat untuk menerapkan dan nilai-nilai tersebut. Pemeluk agama diajarkan mencintai dan menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan dan tidak mencampuri hak prerogatif Allah untuk menghakimi dan memandang ciptaan yang lain lebih berdosa dan lebih hina hanya karena perbedaan keyakinan.

Humanis dalam hal ini berarti kebebasan diri sebagai manusia dari dogma-dogma yang kaku dan mematikan empati dan naluri kemanusiaan. Kebebasan yang dimaksud adalah menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan yang berdasar pada kesadaran bahwa manusia tidak mungkin meniadakan kemahaluasan dan ketidakterbatasan Tuhan (Amin, 2013). Dalam praksisnya, ajaran humanis menghargai manu-

sia sebagai ciptaan Tuhan serta menerima, mengakui dan mengupayakan hak-haknya yang paling asasi dan melakukan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi.

Pendidikan keagamaan amat penting untuk menekankan pesan-pesan humanis. Welas asih, keadilan, kebajikan, pengampunan, penghormatan, pertolongan, perdamaian, empati, tolong menolong merupakan tujuan dan cita-cita moderasi beragama. Hans Kung, sebagai seorang tokoh Pluralisme Agama cukup memberi penekanan tentang perdamaian agama. Dalam hipotesanya ia merumuskan bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama-agama, tidak ada perdamaian dunia tanpa dialog antaragama, dan tidak ada dialog antaragama tanpa pengetahuan yang erat tentang satu dengan yang lain (Kung, 1987). Tentu dapat kita pahami bahwa pengetahuan tentang yang lain tidak mungkin terwujud apabila pemeluk-pemeluk agama tidak mampu bersikap terbuka dan belajar dari yang lain. Hal ini akan tercapai bila pemeluk agama beragama dengan memahami dan memaknai ajaran-ajaran agama dengan moderat.

Dalam konteks moderasi agama Kristen, Paul F. Knitter merupakan tokoh yang cukup populer untuk dijadikan rujukan. Pertemuan dengan dewan parlemen agama-agama di Chicago pada tahun 1993 telah menyetujui deklarasi penting bagi setiap manusia di dunia. Penekanan ini khususnya kepada semua pemeluk agama dalam konteks keagamaan yang berbeda ditekankan untuk menupayakan perdamaian dunia, keselarasan dengan ekosistem, berlaku adil yang menjadikannya sebagai prinsip dasar bersama. Masalah sosial adalah masalah semua agama (Knitter, 2003).

Agama mengatur interaksi manusia dengan prinsip keadilan. Agama mendorong orang untuk bertindak adil, menghormati martabat orang lain, dan memperlakukan setiap orang secara setara tanpa memandang agama, ras, suku, atau status sosial mereka (Zakiyuddin, 2005). Dalam agama, kehormatan juga digambarkan sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai yang dimiliki setiap orang. Dalam hubungan sosial, orang dididik untuk menghormati privasi, pendapat, dan keyakinan orang lain serta menjaga martabat mereka sebagai manusia.

Salah satu nilai agama yang paling penting adalah empati, yang berarti dapat memahami dan merasakan kesedihan orang lain. Agama mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung, serta menghargai kontribusi setiap orang dalam upaya tersebut. Mereka juga mendorong orang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan nilai kerjasama.

### **Kontribusi Pendidikan Keagamaan Menumbuhkan Nasionalisme**

Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan sikap kemanusiaan dan paham kebangsaan yang berkembang setelah lepas dari penjajahan. Pada masa kolonial, rasa nasionalisme muncul karena adanya kesadaran bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari kekejaman penjajah. Tetapi kemudian pada masa pascakolonial, nasionalisme terbentuk karena adanya keinginan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju, beradab dan berdaya saing global (Widodo, 2011). Bangsa ini telah mengalami kemerdekaan selama tujuh puluh delapan tahun, namun cita-cita dan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila belum terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Narasi-narasi persatuan yang digaungkan belum cukup mampu untuk meredakan konflik sosial karena identitas agama. Ditambah lagi arus globalisasi yang merembes ke generasi muda cukup andil dalam memperburuk persatuan dan kesatuan di masyarakat (Maftuh, 2008).

Pendidikan keagamaan dapat berperan untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Narasi-narasi dan sejarah perjumpaan agama-agama di Indonesia menjadi refleksi bagi bangsa ini untuk merajut semangat kebangsaan. Dalam hal ini pendidikan keagamaan memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkembangkan nasionalisme bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut penulis, dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan perlu disisipkan muatan-muatan nasionalisme dan kebangsaan.

Lebih lanjut (Muhammad, 2020), mengatakan bahwa nasionalisme merupakan kecintaan terhadap kemanusiaan, kebanggaan pada bangsa Indonesia dalam mencintai negara dengan menciptakan kerjasama antara manusia tanpa mempertimbangkan suku, ras, keyakinan

maupun agama, dan identitas primordial lainnya demi membangun tatanan kehidupan yang saling menerima dan menghormati keberadaan orang lain sebagai sesama anak bangsa.

Peran agama Islam dalam perwujudan moderasi Beragama di Indonesia salah satunya menguat dalam organisasi Keagamaan Islam yaitu Nahdatul Ulama. Selaku organisasi keagamaan, bagi Nahdatul Ulama, perwujudan dan implementasi nasionalisme bangsa di masa reformasi begitu perlu karena realitas kebangsaan menunjukkan defisit moralitas dalam masyarakat, serta memudarnya semangat kecintaan pada tanah air, tergerusnya identitas kenusantaraan, meningkatnya konflik SARA, dan menjamurnya isu disintegrasi sosial yang bisa saja akan merobek kerukunan bangsa yang telah dirajut oleh para pendiri bangsa ini. Ancaman terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara juga berasal dari munculnya sikap intoleransi, yaitu sikap yang tidak menghormati hak-hak dasar setiap individu yang diatur oleh konstitusi negara (Rahman et al., 2021).

Dalam upaya menjaga NKRI sebagai bangsa yang berdaulat dan mengembangkan pembangunan berdasarkan Pancasila, nasionalisme menegaskan bahwa setiap anak bangsa dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan memiliki hak untuk hidup di negara ini dan bertanggung jawab untuk melindungi NKRI dari ancaman dari luar maupun dalam negeri (Farih, 2019). NU mengembangkan tiga model persaudaraan untuk menegaskan nasionalisme kemanusiaan: persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan persaudaraan sesama manusia (Hosnan et al., 2021).

Dalam agama Kristen, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan bela negara bagi masyarakat sangat penting untuk menjaga harmoni akan hidup dalam kebersamaan tanpa diskriminasi. Untuk itu, sangat jelas pendidikan Kristen mengajarkan dan menekankan nilai dan sikap yang selaras dengan nasionalis. Kekristenan juga mengajarkan bahwa hidup dalam perdamaian meskipun perbedaan ada di masyarakat yang majemuk. Sejujurnya, Alkitab banyak menceritakan pertemuan lintas agama dan budaya dalam pengajarannya. Tetapi, salah satu alasan banyaknya konflik agama adalah kecend-

erungan manusia untuk “mempertuhankan agamanya” dan cenderung mengabaikan substansi tuntutan ajaran kemanusiaan agama. Hal ini kemudian berpotensi merusak kerukunan dan kebersamaan umat beragama, dengan kata lain adanya konflik horizontal dengan segala realitas keragaman karena agama kehilangan ajaran universalitasnya.

Sesungguhnya kekristenan tidak membedakan orang. Setiap orang, dari bangsa mana pun, ras apapun adalah sama yaitu sebagai puncak dari ciptaan Tuhan. Aktualisasi rasa nasionalisme yang selaras dengan pengajaran Alkitab dapat mendemonstrasikan kuasa dan kasih Allah, bagi mereka di tengah-tengah relasi sosial, sebagai bagian dari panggilannya untuk menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Sebab orang percaya atau Kristen bukanlah komunitas yang kaku melainkan persekutuan yang misioner yang harus mengemban misi kerajaan Allah yaitu menghadirkan *shalom* (Susanto, 2019). Hal itu dapat terwujud bila orang percaya hidup dengan bertitik tolak pada konsep kehidupan yang utuh dalam hidup damai dan sejahtera yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan serta menjadi saksi kebenaran di setiap sisi kehidupan (Lie et al., 2022). Dari penjelasan tersebut ajaran kekristenan dalam mengimplementasikan pendidikan menekankan untuk menghargai perbedaan, hidup berdampingan dengan sesama daripada menunjukkan ke-arogansi-an yang tidak sesuai dengan pesan-pesan Alkitab.

Sebagai bagian dari pengajaran gereja, orang Kristen memiliki tanggung jawab sosial untuk merealisasikan *shalom* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Tarigan, 2007). Realisasinya yaitu hidup berdampingan dan bekerja sama dengan sesama sekali pun berbeda keyakinan. Bekerja sama untuk menangani masalah sosial demi perdaban dan kemajuan bangsa. Sebagai umat Allah dan warga negara, gereja memiliki tanggung jawab membantu negara menuntaskan kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Susanto, 2019).

#### IV. PENUTUP

Moderasi beragama dalam konteks pendidikan merupakan tuntutan yang mendesak un-

tuk diaktualisasikan dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan agama dan keagamaan. Semua unsur pendidikan dan insan pendidik perlu menyadari dan memahami pentingnya moderasi beragama. Agama sebagai entitas primordial yang melekat dan amat penting bagi warga negara baik dalam hubungannya dengan relasi sosial maupun dengan yang ilahi berpotensi membawa damai dan harmoni di tengah masyarakat. Warga negara harus dididik hidup menerima perbedaan dan mampu hidup berdampingan di tengah perbedaan-perbedaan yang sangat kompleks. Perwujudannya dapat dilakukan dalam sistem pendidikan agama dan keagamaan yang menekankan ajaran pada nilai humanis-sosialis yang melekat pada agama-agama.

ma.

Sudah saatnya semua agama memikirkan dan mengupayakan moderasi beragama demi harmoni dan kerukunan bangsa. Konflik sosial atas nama agama sangat mendesak ditinggalkan oleh pemeluk-pemeluk agama. Saatnya untuk bersatu dan bangkit demi pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa. Persatuan dan harmoni umat beragama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, terlebih dapat mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial atau disintegrasi bangsa untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil (Suwanto, 2011).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bustanuddin. (2007). *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Raja Grafindo Persada.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Amallia, S. (2019). Hakekat Agama Dalam Perspektif Filsafat Perennial. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3903>
- Amin Husna. (2013). AKTUALISASI HUMANISME RELIGIUS MENUJU HUMANISME SPIRITUAL DALAM BINGKAI FILSAFAT AGAMA. *Substantia*, 15(1), 66–80.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.2026>
- H. Muhammad. (2020). *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan: Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita*. Ircisod.
- Hanafi Imam. (2018). AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG FANATISME; Sebuah upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10, 15.
- Hans Kung. (1987). *Christianity and the Worl Religions* (1st ed.). Fount.
- Hosnan, M., Halim, A., & Gani, A. (2021). Implementasi Pendidikan Islam dalam Membangun Ukhuwah Wathaniyah Persepektif NU. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 4(2), 303–325. <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/214/132>
- I Nyoman Temon ASTAWA. (2021). Pendidikan Agama Dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2). <https://doi.org/10.25078/jpm>.



v7i2.2776

- Imam Hanafi. (2018). AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG FANATISME; Sebuah upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10 No.1 Ja, 12–26.
- Irama Yoga, M. Z. (2021). No Title. *Kaca: Karunia Cahaya Allah; Jurnal Dialogis Ilmu Ilmu Ushuluddin*, 11, No.1, 65–90.
- Join, M. M., Bernad, I. D., & Naja, A. (2021). Membongkar Egosentrisme, Eksklusivisme dan Fiksasi Agama dalam Ruang Publik. *Focus*, 2(1), 56–62. <https://doi.org/10.26593/focus.v2i1.4444>
- Kholidah, N. R. J. (2019). Eksistensi Budaya Lokal Sebagai Penguat Nasionalisme. *LP4MP Universitas Islam Majapahit*, 168–174.
- Lie Tan Lie, Yonathan Alex Arifianto, R. T. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam PAK: Penguatan Bela Negara dan Jati diri Bangsa Menghadapi Superioritas dan Fundamentalisme Atas Nama Agama. *Teologi Berita Hidup*, 4 No.2, 294–308.
- Lukito Ratno. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Syukri Muhammad (ed.); 1st ed.). Pustaka Alvabet.
- Maftuh Bunyamin. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II(2).
- Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Academica*, 5(2), 422–434.
- Nashir Haidar. (1999). *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Pustaka Pelajar.
- Natalia, A. (2016). Faktor-faktor penyebab radikalisme dalam beragama. *Al-Adyan*, 11(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/177630-ID-faktor-faktor-penyebab-radikalisme-dalam.pdf>
- Ode Samsul. (2015). Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku. *Politika*, 6(2), 93–100.
- Paul F. Knitter. (2003). *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global* (4th ed.). BPK Gunung Mulia.
- Permata Adinda. (2021). *Riset Pew: Indonesia Negara Paling Religius di Dunia, Mengalahkan Negara Timur Tengah*. Asumsi.Co.
- Putra, T. A. H. (2017). Kearifan lokal upacara larungan telaga ngebel dalam membangun harmonisasi sosial. *Jurnal Civic Hukum*, 2(November), 65–77.
- Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2021). Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme. *Jurnal Artefak*, 8(2), 97. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.5555>
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2), 56–65.
- Susanto, H. (2019). The Church as God's People and The Patner of State. *Jurnal Jaffray*, 17(1), 35–56. <https://doi.org/10.25278/jj.v17i1.298>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Tarigan, J. (2007). *Religiositas Agama & Gereja Katolik*. PT Grasindo.
- Widodo Suwanto. (2011). IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, I(1), 18–31.
- Wiwit Kurniawan. (2017). *Pendidikan dan Kita*. El-Markhazi.
- Zakiyuddin, B. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (M. Sayed (ed.)). ERLANGGA.